



# LAPORAN

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN  
DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**



**Periode NEI 2020 s/d OKTOBER 2020**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**

*Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunung Sitoli*

*Telp. (0639) 21343 FAX : (0639) 21343*

*Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id)*



# PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : 21744 – KETUA

21343 – KEPANITERAAN – FAX (0639/21343)

Gunungsitoli, Oktober 2020

Nomor : W2.U12/\_\_\_/HK.01.5/V/2020

Kepada Yth. :

Lampiran : 1 (satu) set

Bapak Direktur Jenderal Badan

Perihal : **Survei Persepsi Korupsi (SPK)  
Pengguna Layanan di Pengadilan  
Negeri Gunungsitoli Periode Mei 2020  
s/d Oktober 2020**

Peradilan Umum

di -

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung

RI Lantai 3, 4 dan 5.

Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka  
Putih Timur Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi yang dilakukan secara rutin per-enam bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan Laporan Survei Persepsi Korupsi Periode Mei 2020 s/d Oktober 2020, (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
GUNUNGSITOLI KELAS IB**

**AGUS KOMARUDIN, S.H.**  
NIP. 198808291996031003

**Tembusan:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB)

**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN**

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI**

**SEMESTER II**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

**KELAS IB**



**TAHUN 2020**

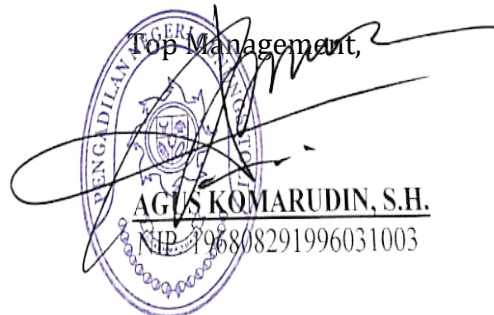
---

# LEMBAR PENGESAHAN

---

## LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

Disahkan di Gunungsitoli  
Oktober 2020

Top Management,  
  
AGUS KOMARUDIN, S.H.  
NIP. 196808291996031003

Sekretaris Tim Survei,

Ketua Tim Survei,

Trisman Zandroto  
NIP. 196812291989031002

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.  
NIP. 197905122007041001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB semester II tahun 2020 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi oleh responden. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja tim survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih dari korupsi.

Demikianlah laporan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB semester II tahun 2020 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Gunungsitoli,      Oktober 2020

**Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
BAB II .....	4
METODOLOGI .....	4
2.1. Metode Penelitian .....	4
2.2. Populasi dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	5
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	6
BAB III .....	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....	8
3.1. Profil Responden .....	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator .....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.....	21
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.....	21
BAB IV .....	24
PENUTUP .....	24
4.1. Kesimpulan .....	24
4.2. Rekomendasi .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3 Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4 Rencana Kerja**

### **1.4.1. Tahap Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:



- a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.
- b) Penyiapan bahan kuesioner, bagian dari kuesioner / pengantar dan kelengkapan peralatan, penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data, jumlah responden dan lokasi dan waktu pengumpulan data.
- c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- a) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b) Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c) Pengujian kualitas dan validitas data.
- d) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Metode dilakukan secara periodik semester dalam interval waktu per 6 (enam) bulan (dua kali setahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metodologi Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah

proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi oleh responden. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 15 (lima belas) hari atau data minimal 100 (seratus) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang Hukum). Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

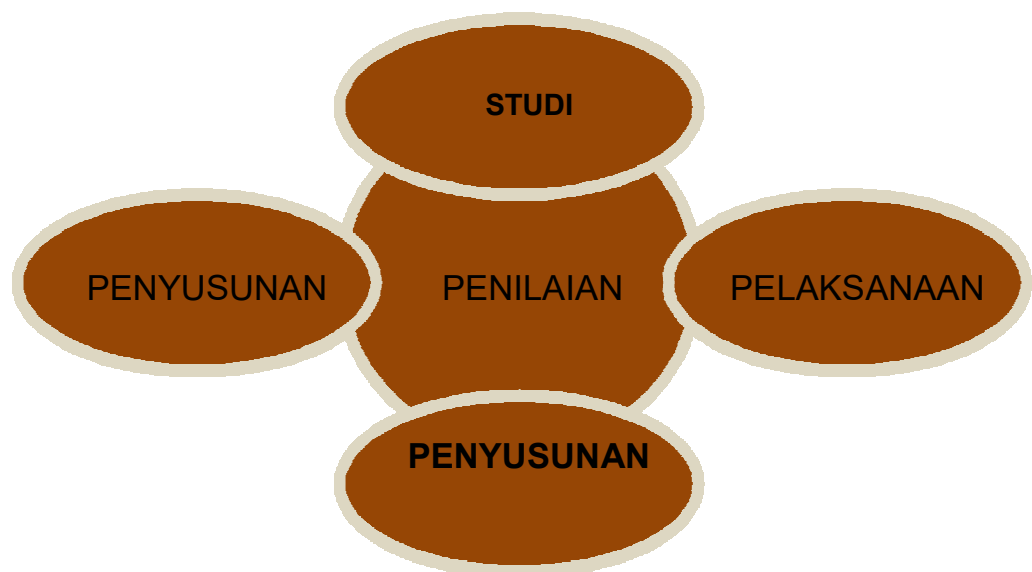
**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **Bersih Dari Korupsi**.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 2.6. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas**



**Tabel 2.6 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 2.6.1. Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari Korupsi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1. Profil Responden

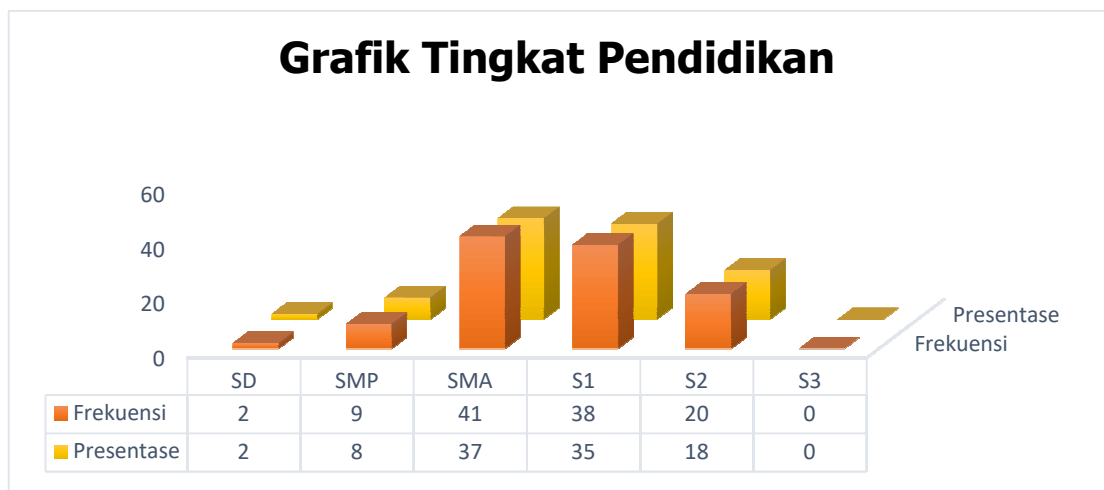
##### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mayoritas memiliki pendidikan Strata I – Strata II.

**Tabel 3.1.1. Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		f	%
1.	S3	0	0 %
2.	S2	20	18 %
3.	S1	38	35 %
4.	SMA/ SMK	41	37 %
5.	SMP/SLTP	9	8 %
6.	SD	2	2 %
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



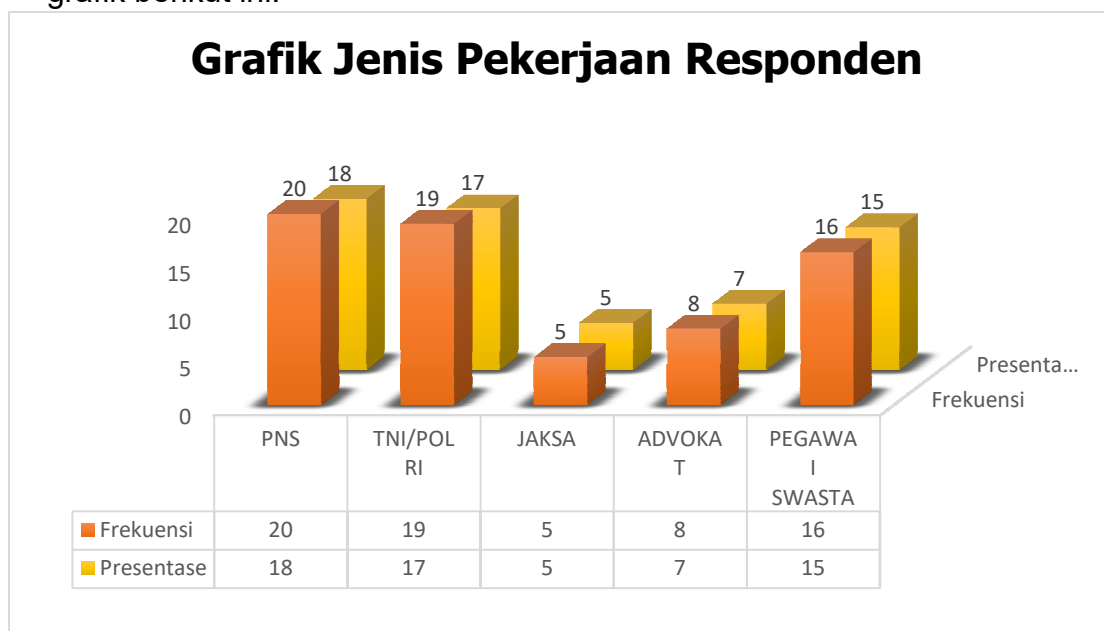
### 3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki pekerjaan dalam kategori Lainnya diantaranya Mahasiswa, Tani, Ibu Rumah Tangga (Lainya), sebanyak 42 responden, diurutkan kedua pekerjaan responden adalah Wiraswasta sebanyak 15 responden, dan urutan terakhir sebagai Pedagang.

**Tabel 3.1.2. Jenis Pekerjaan Responden**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		f	%
1	PNS	20	18 %
2	TNI/POLRI	19	17 %
3	JAKSA	5	5 %
4	ADVOKAT	8	7 %
5	PEGAWAI SWASTA	16	15 %
6	LAINNYA	42	38 %
Jumlah		110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



### 3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun - 35 tahun. Bagi kelompok usia 36-50 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia 51 tahun – 70 tahun dan kelompok usia kurang dari 18 tahun dan terakhir responden pada kelompok usia responden di atas 70 tahun tidak ada.

**Tabel3.1.3.Usia Responden**

No.	Usia Responden	Frekuensi	
		f	%
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	22 orang	20 %
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	46 orang	42 %
3	40 Tahun s/d 50 Tahun	35 orang	32 %
4	51 Tahun s/d 61Tahun	7 orang	6 %
Jumlah		110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.





### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

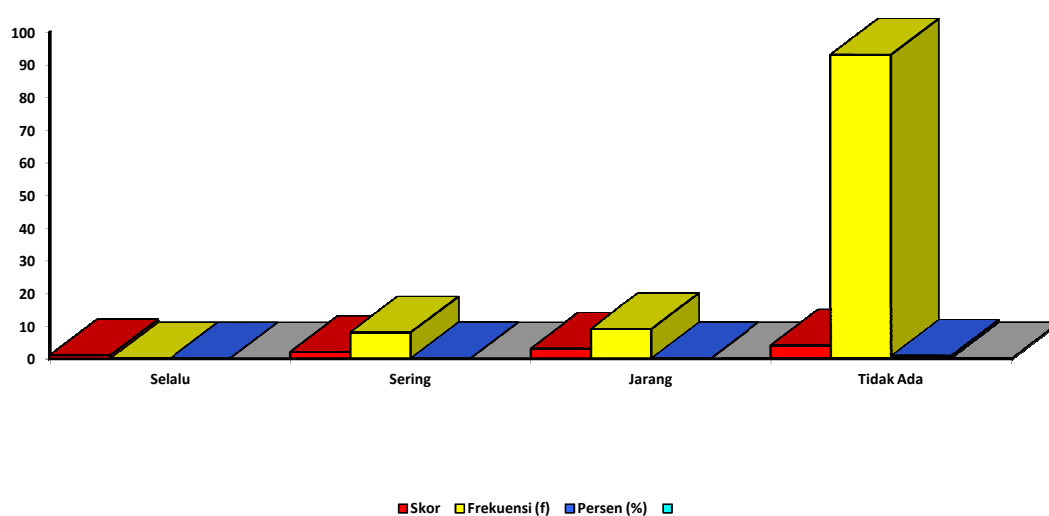
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 3.77. Melalui nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	8	7.3 %
3.	Jarang	3	9	8.2 %
4.	Tidak Ada	4	93	84.5 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

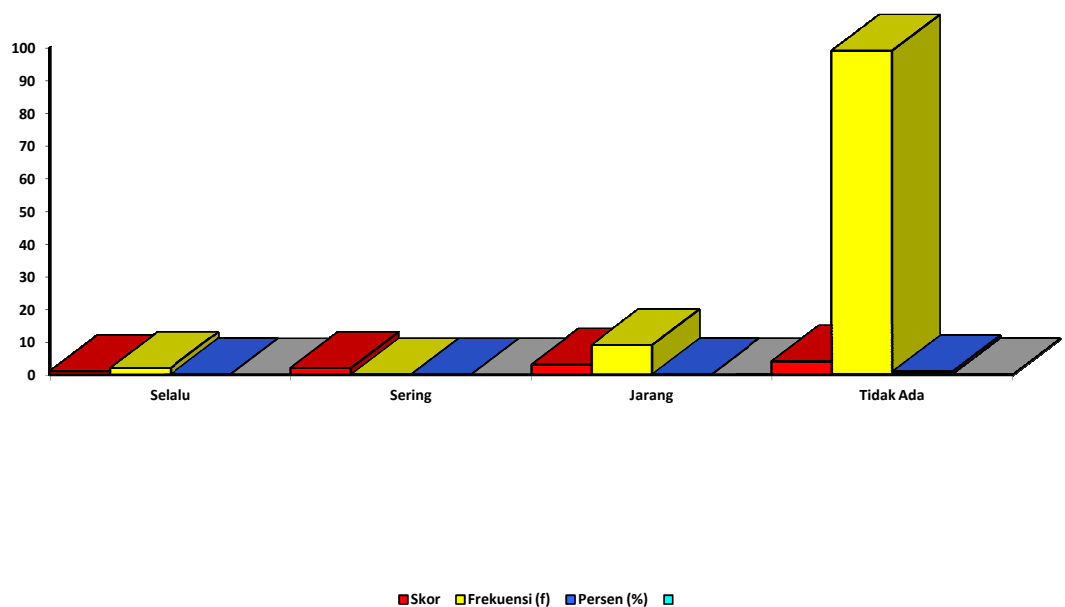
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 3.86. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	1.8 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	9	8.2 %
4.	Tidak ada	4	99	90 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Penyalahgunaan Jabatan



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

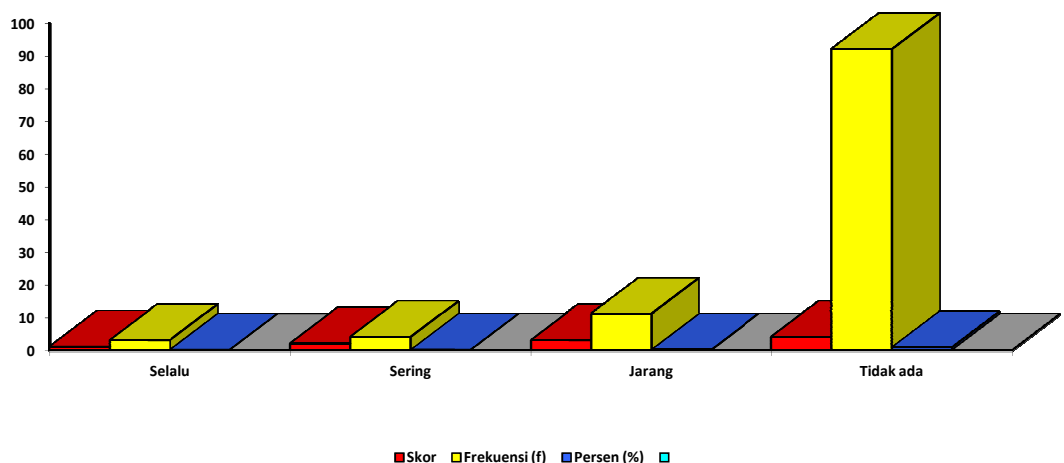
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil index 3.75. Dengan hasil indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	3	2.7 %
2.	Sering	2	4	3,6 %
3.	Jarang	3	11	10 %
4.	Tidak ada	4	92	83.7 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Menjual Pengaruh



### 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

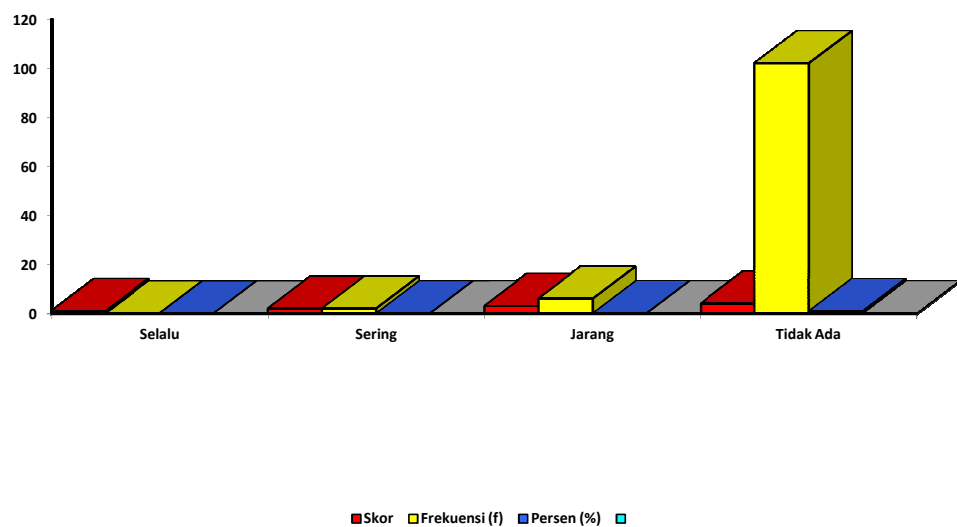
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 3.91. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	2	1.8 %
3.	Jarang	3	6	5.5 %
4.	Tidak ada	4	102	92.7 %
<b>Jumlah</b>			<b>110</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Biaya



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

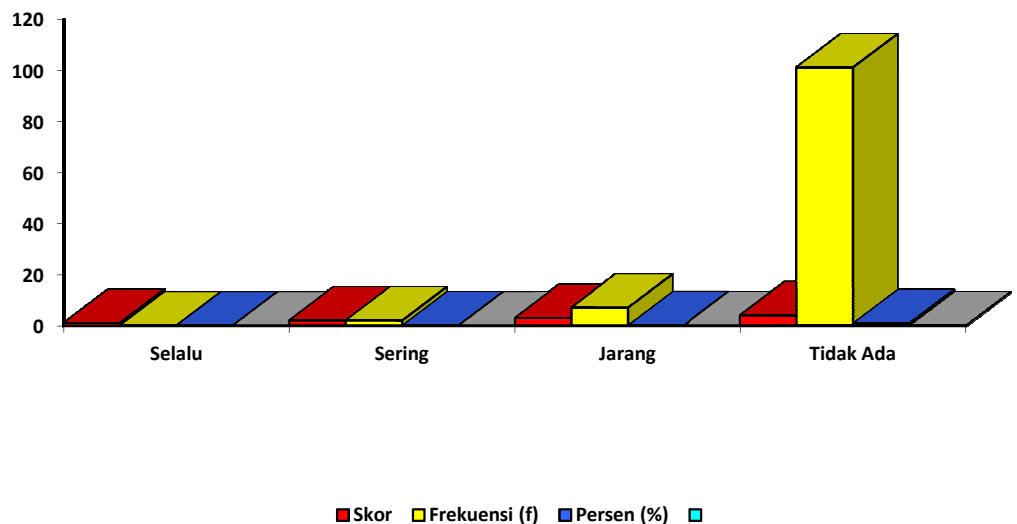
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index 3.89. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	2	1.8 %
3.	Jarang	3	7	6.4 %
4.	Tidak ada	4	101	91.8 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Biaya Tambahan**



### 3.2.6. Indikator Hadiah

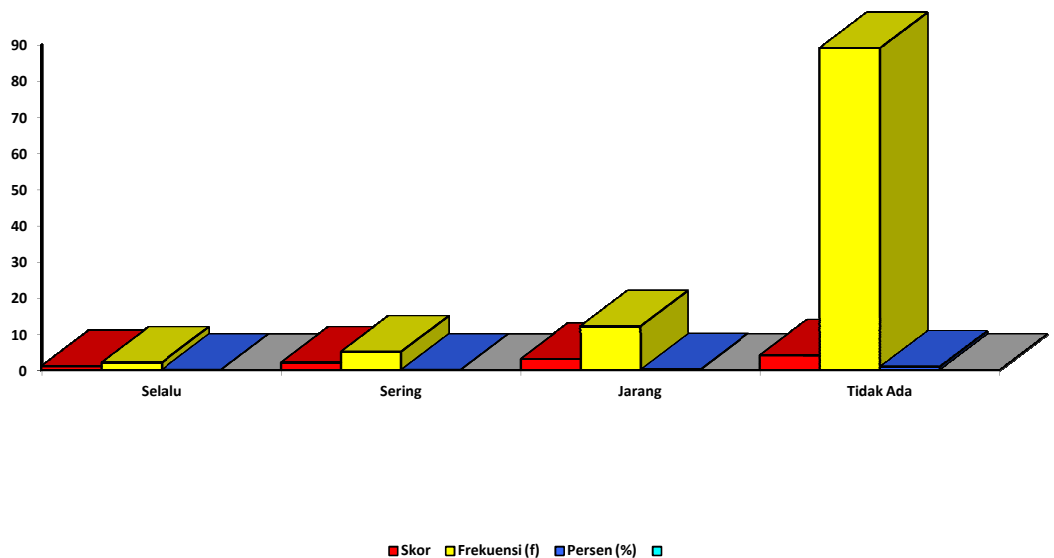
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3.80 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.6. Indikator Hadiah**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	1.8 %
2.	Sering	2	2	1.8 %
3.	Jarang	3	12	10.9 %
4.	Tidak ada	4	94	85.5 %
<b>Jumlah</b>			<b>110</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Hadiah



### 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

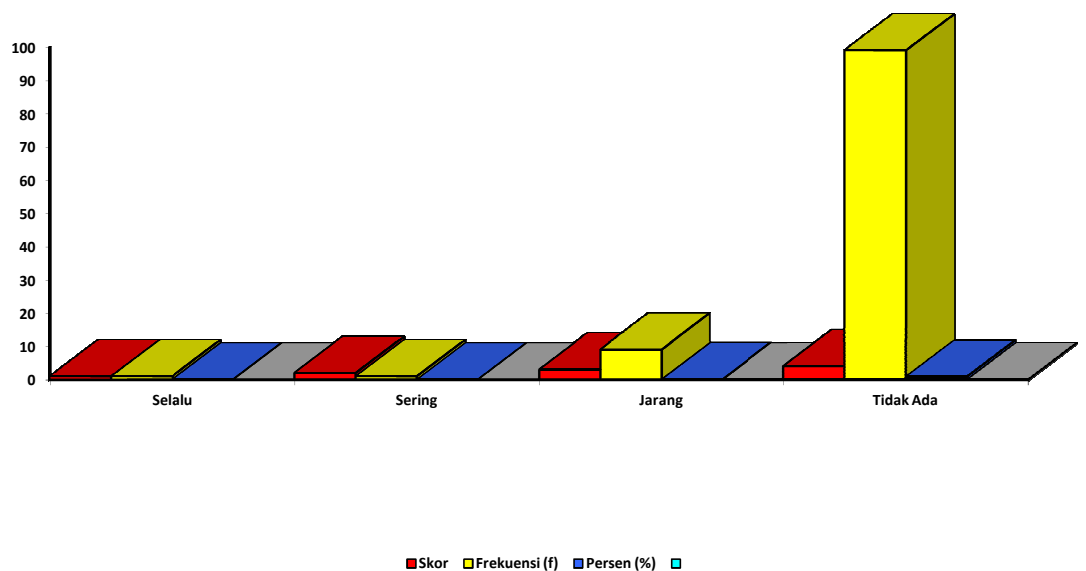
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3.88. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	0.9 %
2.	Sering	2	1	0.9 %
3.	Jarang	3	9	8.2 %
4.	Tidak ada	4	99	90 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Pembayaran



### 3.2.8. Indikator Pencaloan

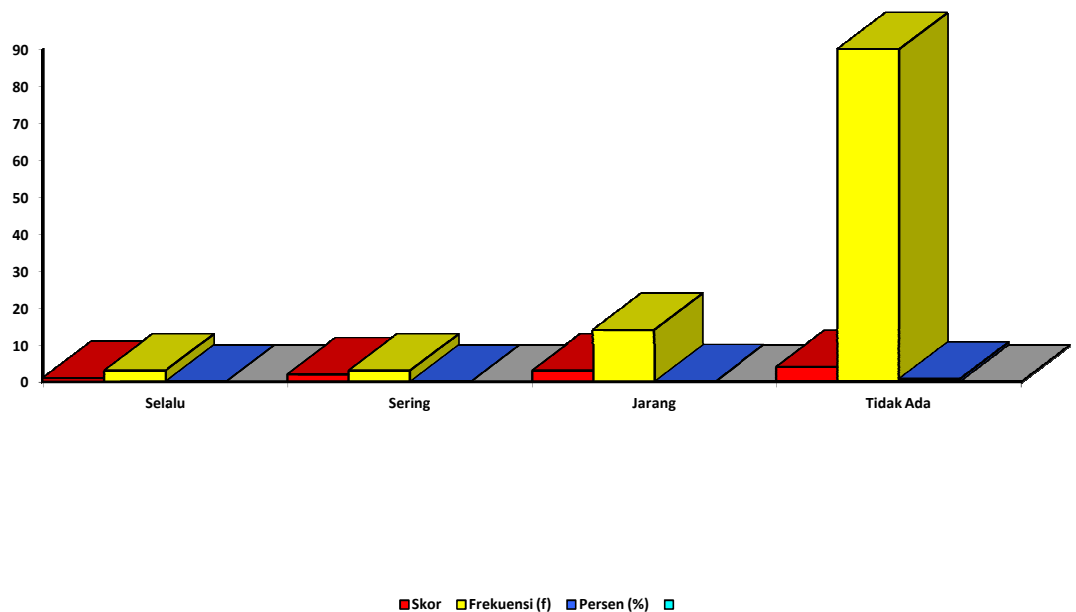
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.74. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.8. Indikator Pencaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	3	2.7 %
2.	Sering	2	3	2.7 %
3.	Jarang	3	14	12.8 %
4.	Tidak ada	4	90	81.8 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Pencaloan





### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

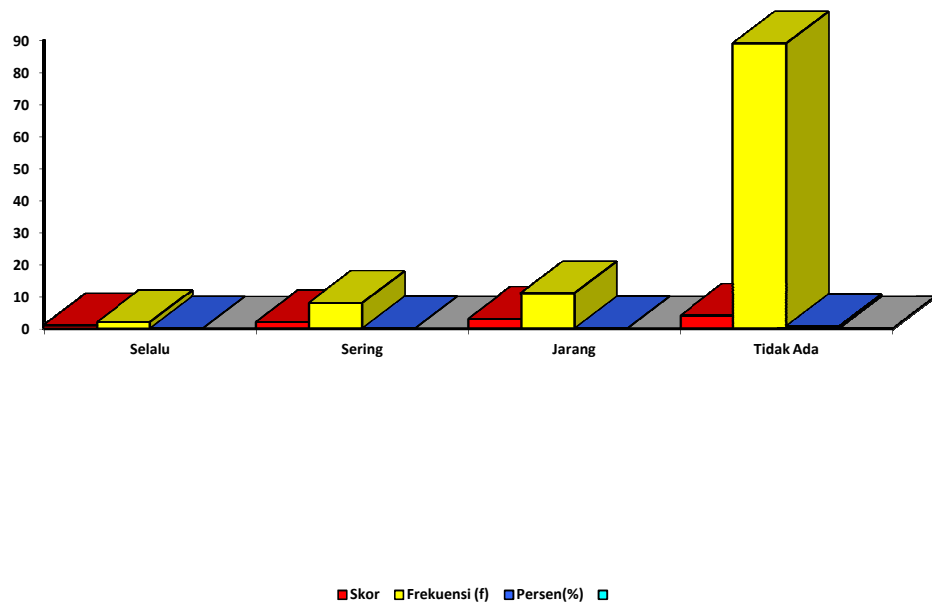
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3.70. Nilai Indeks 3.82 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	1.8 %
2.	Sering	2	8	7.3 %
3.	Jarang	3	11	10 %
4.	Tidak ada	4	89	80.9 %
<b>Jumlah</b>			<b>110</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Perbuatan Curang



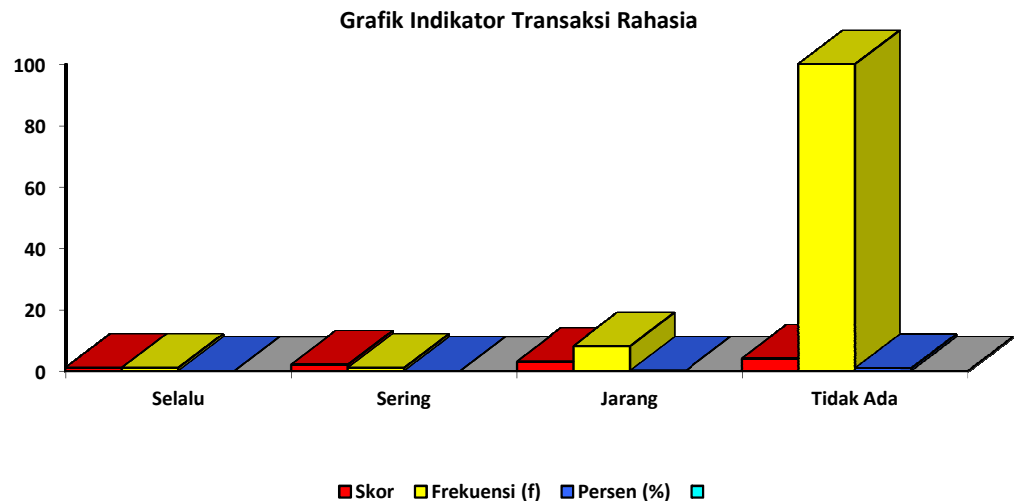
### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index 3.88. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	0.9 %
2.	Sering	2	1	0.9 %
3.	Jarang	3	8	7.3 %
4.	Tidak ada	4	100	90.9 %
Jumlah			110	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB sebesar **95.25**. dengan persentase **95.25** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

**Tabel3.3. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (IPK)	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25 -43.75	1	Tidakbersih dari korupsi
2	1.76 -62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan ;
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan ;
3. Transparansi Biaya sudah cukup Baik ;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan ;
5. Daftar panjar biaya perkara susah sesuai dengan kondisi saat ini.

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli 3,81.

**Tabel Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja  
Pengadilan Negeri Gunungsitoli**

No.	Uraian	Nilai						Kinerja
		Bersih	Cukup	Kurang	Tidak	Nilai	Nilai	
		4	3	2	1	Interval	Interval IPK	
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal manipulasi peraturan ?	372	27	16	0	3.77	94,25	Bersih
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Penyalahgunaan Jabatan ?	396	27	0	2	3.86	96,50	Bersih
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Menjual Pengaruh ?	368	33	8	3	3.75	93,75	Bersih
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Transparansi Biaya ?	408	18	4	0	3.91	97,75	Bersih
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Biaya Tambahan ?	404	21	2	1	3.89	97,25	Bersih
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Hadiah/Gratifikasi ?	376	36	4	2	3.80	95,00	Bersih
7	Bagaimana pendapat Saudara mengenai Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transparansi Pembayaran?	396	27	2	1	3.88	97,00	Bersih
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Pencaloan?	360	42	6	3	3.74	93,50	Bersih
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Perbuatan Curang?	356	33	16	2	3.70	92,50	Bersih
10	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transaksi Rahasia?	400	24	2	1	3.88	97,50	Bersih
<b>Rata-rata Nilai Indeks Persepsi Korupsi</b>						3.81	95.5	Bersih

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,851 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan / Prosedur, mendapat Indeks 3.77
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.86
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.75
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.91
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.89
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.80
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.88
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3.74
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.70
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.88

#### **Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa rata - rata indikator memiliki Indeks di atas **3.81** atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **“Perbuatan Curang”**, **“Percaloan”** dan **“Menjual Pengaruh”** memiliki nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.

# LAMPIRAN

